

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atik Catur Budiati, *Sosiologis Konsektual*, Mediatama, Jakarta, 2009.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Hessel Nogi S, *Wacana Kebijakan Publik Di Indonesia*, YPAP, Yogyakarta, 2003.
- Imam Soebekti, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta*, Sinar Grafika, 2012.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta, 2013.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori & Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Leutika Prio, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015.

Oetje Salman dan Anthon F, *Teori Hukum (mengingat, menguumpul dan membuka kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Supramono, dkk, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme Dan Perhitungan)*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru)*, Edisi 6 Buku I, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Wilayah Kota Pariaman.

C. JURNAL

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Garut, Vol.11; No. 01, 2017.

Githa Margaretha, Rudi J. Pusung, *Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt.Nichindo Manado Suisa*, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.5 No.2, 2017.

Meilan Agu, Sifrid S. Pengemanan & Robert Lambey, *Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 15, No. 04, 2015.

Witri, Mochammad Djudi, Sri Sulasmiyati, *Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol. 9 No. 1, 2016.

Yessie Arisanti, *Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau, Pekanbaru, Volume 13, Nomor 4, 2016.

D. WEBSITE

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-132.pdf>, diakses pada tanggal 25 februari 2022, Pukul 20.30 Wib.

<https://aguspajak.com/2021/01/08/istilah-pajak/> diakses pada tanggal 15 januari 2023.

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/374/jbptunikompp-gdl-sitikurnia-18696-7-pertemua-7.pdf> di akses pada tanggal 15 januari 2023.